

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Ajeng Sendang Lestari¹, Awan Setiawan², Dedi Mulyasana³

Email : ritchie8990@gmail.com¹, awan2425@gmail.com², dedi.mulyasana@gmail.com³

¹Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

^{2,3}Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah. Namun, proses pembangunan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja daerah, serta lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan efisiensi anggaran dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian meliputi Bappeda, BKAD, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta komite sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan diturunkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2025 telah mendorong pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja dan memprioritaskan belanja modal sektor pendidikan. Implementasi efisiensi anggaran berjalan cukup efektif berkat dukungan sistem digital seperti SIPD, SAKIP, dan SIJAGUR yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa ketidaksinkronan data antarinstansi, keterbatasan kompetensi SDM teknis, serta keterlambatan proses pengadaan yang berpengaruh terhadap percepatan pembangunan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran memiliki kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama ketika ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital. Rekomendasi diberikan agar pemerintah daerah memperkuat integrasi sistem informasi pembangunan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memperluas partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan pendidikan.

Kata kunci: efisiensi anggaran, kebijakan publik, infrastruktur pendidikan, implementasi kebijakan, Kabupaten Sumedang.

ABSTRACT

The development of educational infrastructure is one of the strategic priorities of the Sumedang Regency Government to enhance human resource quality and strengthen regional competitiveness. However, this development process still faces challenges, including budget

constraints, inefficiencies in regional expenditure management, and weak coordination among governmental agencies. This study aims to analyze the implementation of budget efficiency policies in the development of educational infrastructure in Sumedang Regency, focusing on the aspects of planning, implementation, and supervision.

This research employs a qualitative approach with a case study design. Informants include the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Regional Financial and Asset Agency (BKAD), the Education Office, school principals, and school committees. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the budget efficiency policy implemented through Presidential Instruction No. 1 of 2025 and further mandated in Sumedang Regent Regulation No. 14 of 2025 has encouraged the regional government to rationalize expenditures and prioritize capital spending in the education sector. The implementation of this efficiency policy has been relatively effective due to the support of digital systems such as SIPD, SAKIP, and SIJAGUR, which enhance transparency and accountability in financial governance. Nonetheless, several challenges remain, including data inconsistencies among institutions, limited technical human resource capacity, and procurement delays that affect the acceleration of development.

This study concludes that budget efficiency contributes significantly to accelerating educational infrastructure development, particularly when supported by good governance practices, strong inter-agency coordination, and the utilization of digital technologies. Recommendations are provided for the regional government to strengthen the integration of development information systems, improve staff competencies, and expand public participation in the planning and monitoring of educational development.

Keywords: *budget efficiency, public policy, educational infrastructure, policy implementation, Sumedang Regency.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien.

Efisiensi anggaran menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan data terbaru dari sumber-sumber tersebut (perkiraan tahun ajaran 2023/2024), total jumlah satuan pendidikan di Jawa Barat adalah sekitar 62.142 unit (data Kemendikbud per 2023/2024), yang menempatkan Jawa

Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak.

Tabel Rincian Jumlah Satuan Pendidikan di Jawa Barat

Jenjang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan (Unit)	Keterangan/Sumber Data
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	~35.000 (Perkiraan)	Mencakup KB (Kelompok Bermain), TPA, dan SPS.
Sekolah Dasar (SD) Sederajat	23.911	Dapodik Kemendikbudristek (Dikdas)
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat	9.411	Dapodik Kemendikbudristek (Dikdas)
Sekolah Menengah Atas (SMA)	515	Di bawah wewenang Disdik Provinsi Jabar.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	286	Di bawah wewenang Disdik Provinsi Jabar.
Sekolah Luar Biasa (SLB)	Ratusan	Termasuk dalam data Disdik Provinsi Jabar.
Perguruan Tinggi (PT)	420	Data LLDIKTI Wilayah IV (Perguruan Tinggi Aktif, tidak termasuk PTN K/L)

Dalam beberapa tahun terakhir, isu efisiensi anggaran mendapat perhatian serius di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sumedang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terus mendorong daerah agar mampu menerapkan prinsip value for money, yaitu suatu pendekatan

pengelolaan anggaran yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam setiap proses belanja daerah. Melalui pendekatan ini, setiap program pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang proporsional.

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki visi untuk menjadi Kabupaten Digital, Inovatif, dan Religius dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan pembangunan manusia yang unggul. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023 yang kemudian dilanjutkan dalam RPD 2024–2026. Pemerintah daerah menyadari bahwa pendidikan merupakan pilar fundamental bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa sekolah dasar dan menengah masih mengalami kekurangan ruang kelas, laboratorium, sarana sanitasi, serta fasilitas pendukung kegiatan belajar. Di sisi lain, alokasi anggaran sektor pendidikan meskipun cukup besar, belum sepenuhnya menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara rencana program dan capaian fisik di lapangan, keterlambatan realisasi belanja modal, serta keterbatasan koordinasi antarperangkat daerah.

Isu utama yang dihadapi Kabupaten Sumedang dalam konteks pembangunan infrastruktur pendidikan bukan hanya keterbatasan anggaran, melainkan juga kurangnya efisiensi dalam implementasi anggaran. Efisiensi anggaran tidak semata diukur dari kecilnya pengeluaran, tetapi dari sejauh mana pengeluaran tersebut menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya efisiensi anggaran daerah antara lain:

- 1) proses perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dan kebutuhan riil;
- 2) tumpang tindih program antarperangkat daerah;
- 3) lemahnya koordinasi antarstakeholder pembangunan; serta
- 4) keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap lambatnya percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah perdesaan dan daerah pinggiran. Ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek, pembengkakan biaya, serta turunnya kualitas hasil pembangunan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme efisiensi anggaran menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan infrastruktur pendidikan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Efisiensi anggaran berperan sebagai katalis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Ketika proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara efisien, maka dana publik dapat dialokasikan pada program prioritas yang benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Sumedang,

penerapan efisiensi anggaran menjadi bagian penting dari strategi percepatan pembangunan yang diatur dalam kebijakan “Sumedang Simpati dan Smart Governance”, di mana digitalisasi sistem perencanaan dan evaluasi (melalui SIPD, SAKIP, dan SIJAGUR) digunakan untuk mengurangi kebocoran dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghematan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan produktivitas belanja publik. Infrastruktur pendidikan yang memadai akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta memperkuat daya saing sumber daya manusia lokal.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai pilot project efisiensi anggaran daerah di Jawa Barat. Pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dalam tata kelola keuangan dan pembangunan, seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Online, Sumedang Command Center, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Berbagai inovasi tersebut memungkinkan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara real time sehingga mendorong terwujudnya efisiensi birokrasi dan penggunaan anggaran.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur pendidikan, inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah klasik seperti keterlambatan tender, ketidaktepatan sasaran program, dan lemahnya pengawasan proyek. Penerapan prinsip governance by data menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah percontohan dalam

reformasi tata kelola keuangan publik di tingkat kabupaten.

Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, tantangan utama masih terletak pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan efisiensi anggaran memerlukan kapasitas institusional yang kuat, sinergi antarperangkat daerah, serta komitmen pimpinan daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Sumedang, keempat aspek ini masih perlu diperkuat agar kebijakan efisiensi anggaran dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan makro yang dirancang di tingkat kabupaten dengan realitas mikro di tingkat kecamatan atau desa. Perbedaan kemampuan teknis dan administratif antarunit pelaksana di lapangan dapat menghambat optimalisasi anggaran, sehingga perlu strategi implementasi yang adaptif dan partisipatif.

Penelitian mengenai efisiensi anggaran dalam pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada aspek makro atau fiskal, bukan pada implementasi kebijakan di sektor spesifik seperti pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian terkait implementasi efisiensi anggaran terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sumedang yang memiliki karakteristik administratif, geografis, dan sosial ekonomi yang unik.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi empiris dalam menilai sejauh

mana kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya dalam bidang implementasi efisiensi anggaran daerah. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori implementasi kebijakan berbasis efisiensi fiskal di sektor pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur pendidikan agar lebih efisien dan berdampak luas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan **metode studi kasus** untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami proses implementasi, dinamika antaraktor, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan fokus pada perangkat daerah yang terlibat langsung dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan infrastruktur pendidikan pada tahun anggaran 2025.

Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan peran, pengetahuan, dan keterlibatan mereka terhadap kebijakan yang diteliti. Informan kunci meliputi:

- a. Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang
- b. Kepala Bidang Anggaran BKAD
- c. Kepala Dinas Pendidikan
- d. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
- e. Kepala sekolah (SD dan SMP)
- f. Perwakilan komite sekolah / tokoh masyarakat

Jumlah informan ditentukan berdasarkan **kejenuhan data (data saturation)**, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara semistruktur dilakukan untuk memperoleh informasi detail mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan efisiensi anggaran. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian namun tetap memberi fleksibilitas untuk menggali jawaban informan.

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan pada kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan sekolah untuk melihat secara langsung bagaimana koordinasi, proses pelaksanaan proyek, serta hambatan di lapangan terjadi. Catatan observasi disusun secara sistematis.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen yang dianalisis meliputi:

- a. APBD dan dokumen perubahan APBD
 - b. RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya
 - c. Peraturan terkait (Inpres No. 1/2025, Perbup No. 14/2025)
 - d. Sistem digital pemerintahan (SIPD, SAKIP, SIJAGUR)
- Analisis dokumen digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi data hasil wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, meliputi:

- a. **Reduksi Data:** proses menyaring, mengodekan, dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penelitian.
- b. **Penyajian Data:** menyusun data dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi tematik untuk memudahkan interpretasi.
- c. **Penarikan Kesimpulan:** melakukan verifikasi berulang hingga diperoleh temuan yang konsisten dan valid.

Proses analisis dilakukan secara siklus dan berlangsung selama seluruh proses penelitian.

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian menerapkan:

- a. Triangulasi sumber dan metode
- b. Member checking kepada informan untuk mengonfirmasi interpretasi peneliti

- c. Peer debriefing melalui diskusi dengan pembimbing/penelaah
- d. Audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data

Pertimbangan Etika

Penelitian mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk:

- a. persetujuan informan (informed consent),
- b. kerahasiaan identitas,
- c. partisipasi sukarela, dan
- d. tidak merugikan pihak manapun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumedang merupakan wilayah strategis di Jawa Barat dengan luas 1.520,22 km² dan 26 kecamatan. Variasi geografis dari dataran rendah hingga dataran tinggi menjadikan pemerataan infrastruktur pendidikan sebagai tantangan utama bagi pemerintah daerah. Topografi ini berpengaruh pada kebutuhan pembangunan ruang kelas, rehabilitasi sekolah, dan aksesibilitas sarana pendidikan.

Hasil Penelitian

Perencanaan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi efisiensi anggaran di Kabupaten Sumedang dimulai dari perencanaan berbasis kebutuhan (need-based planning). Pemerintah daerah mengacu pada:

- a. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
- b. Peraturan Bupati Sumedang No. 14 Tahun 2025
- c. RPJMD Kabupaten Sumedang

Perencanaan pembangunan sarana pendidikan ditetapkan berdasarkan kondisi kerusakan sekolah, pemerataan layanan, dan prioritas peningkatan kualitas SDM. Digitalisasi perencanaan melalui SIPD dan SIJAGUR memperkuat akurasi data dan transparansi dalam penyusunan program.

Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan menekankan pada:

- a. Pengendalian belanja rutin
- b. Peningkatan belanja modal pendidikan
- c. Mekanisme lelang terbuka
- d. Pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital

Pelaksanaan pembangunan seperti rehabilitasi ruang kelas, perbaikan sanitasi sekolah, dan penyediaan sarana pendukung dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Temuan lapangan:

- a. Efisiensi tercapai melalui rasionalisasi kegiatan yang tidak prioritas.
- b. Koordinasi lintas perangkat daerah (Bappeda, BKAD, Disdik) membaik namun belum sepenuhnya sinkron.
- c. Digitalisasi monitoring melalui SIJAGUR membantu meningkatkan akuntabilitas.
- d. Masih terdapat kendala SDM teknis dan keterlambatan proses pengadaan.

Temuan ini sejalan dengan model **Edward III**, di mana faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana sangat memengaruhi efektivitas implementasi.

Pengawasan Implementasi

Pengawasan dilakukan melalui:

- a. Inspektorat daerah
- b. Sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP)
- c. Pelaporan berkala pada aplikasi SIPD & SIJAGUR

Pengawasan berbasis digital membantu meminimalkan penyimpangan dan memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi. Namun, masih ada kendala seperti inkonsistensi data dan keterbatasan kemampuan operator sistem.

Dukungan data

Pengawasan yang kuat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan mempercepat penyelesaian proyek sekolah prioritas .

Dampak Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran

Dampak positif yang teridentifikasi:

- a. Peningkatan kualitas sarana/prasarana pendidikan
- b. Percepatan rehabilitasi sekolah rusak
- c. Penurunan pemborosan anggaran
- d. Implementasi digital governance yang lebih matang

Dampak tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi belanja, tetapi juga mengoptimalkan output pembangunan.

Namun, dampak belum merata pada semua kecamatan, terutama daerah pedesaan yang aksesibilitasnya rendah.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edward III

Berdasarkan teori Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh:

1. Komunikasi:
Koordinasi antar-OPD meningkat namun terkendala perbedaan basis data. Hal ini memerlukan integrasi sistem antarinstansi.
2. Sumber Daya:
Keterbatasan SDM teknis menjadi hambatan utama, sejalan dengan hasil

penelitian lain bahwa digitalisasi memerlukan kompetensi aparatur (Sari, 2022).

3. Disposisi:

Komitmen pimpinan daerah dan pelaksana meningkat; Sumedang sebagai pilot project efisiensi anggaran memperkuat disposisi positif birokrasi.

4. Struktur Birokrasi:

Prosedur administrasi masih panjang, menghambat percepatan pembangunan.

Temuan ini konsisten dengan literatur bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, koordinasi, dan kapasitas organisasi.

Pembahasan Berdasarkan Integrated Implementation Model (IIM) Winter

Model IIM Winter menunjukkan bahwa implementasi dipengaruhi interaksi antara:

- a. Desain kebijakan
- b. Perilaku organisasi
- c. Perilaku pelaksana lapangan
- d. Respons kelompok sasaran
- e. Lingkungan eksternal

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Kebijakan, Kebijakan efisiensi anggaran dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumedang terbukti menekan pemborosan anggaran dan meningkatkan fokus alokasi pada kebutuhan prioritas. Penggunaan mekanisme lelang yang transparan dan

- monitoring digital memperkuat efektivitas implementasi.
2. Perencanaan dan Strategi Implementasi, Perencanaan berbasis data kebutuhan nyata sekolah serta alokasi anggaran secara bertahap mendukung strategi implementasi yang adaptif. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Edward III (1980) terkait sumber daya, komunikasi, dan disposisi birokrasi serta Integrated Implementation Model (IIM) Winter (2012–2020) tentang interaksi aktor, strategi, dan konteks.
 3. Partisipasi Pemangku Kepentingan, Keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam menentukan prioritas rehabilitasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan. Namun, partisipasi ini masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan.
 4. Hambatan dan Tantangan, Keterbatasan SDM, prosedur birokrasi yang panjang, dan resistensi internal terhadap prosedur baru menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran.
 5. Dampak terhadap Kualitas Pendidikan, Implementasi kebijakan efisiensi anggaran berdampak positif pada kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga operasional.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Tingkatkan kapasitas SDM di OPD dan sekolah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring digital.
2. Perkuat partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, melalui strategi komunikasi dan pemberdayaan.
3. Sesuaikan atau sederhanakan prosedur birokrasi dan tender tanpa mengorbankan transparansi.
4. Lakukan monitoring dan evaluasi proyek secara rutin berbasis digital untuk mendeteksi penyimpangan lebih awal.
5. Ukur dampak kebijakan secara kuantitatif melalui indikator kualitas sarana/prasarana dan efektivitas proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-Making: An Introduction*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bappeda Kabupaten Sumedang. (2014). *Laporan Analisis Timbulan Sampah Kabupaten Sumedang*. Sumedang: Bappeda.
- Bappenas. (2020). *Laporan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Boston: Pearson Education.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing Grounded Theory* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, A. (2023). *Efisiensi Anggaran Publik dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Era Digitalisasi Pemerintahan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–115.
- Heywood, A. (2024). *Politics* (7th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Lestari, A. S. (2025). *Optimalisasi Penggunaan Anggaran melalui SAKIP terhadap Percepatan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sumedang*. Bandung: Universitas Langlangbuana.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miftah Thoah. (2017). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya dalam Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, R., & Rachman, F. (2021). *Implementasi Kebijakan Efisiensi Belanja Modal terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–59.
- Rahmawati, D. (2020). *Analisis Efisiensi Anggaran Pendidikan terhadap Kualitas Infrastruktur Sekolah di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 210–225.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2020). *Political Science: An Introduction* (15th ed.). New York: Pearson.
- Sari, N. (2022). *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 89–103.
- Smith, P. (2019). *Public Sector Performance Management*. New York: Routledge.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2019). *Basics of Qualitative Research: Techniques and*

Procedures for Developing Grounded Theory (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Surya Adi Tama, P., & Wirama, D. G. (2020). *Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Publik di Era Digital*. Denpasar: Udayana University Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley.

UNESCO. (2018). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.

Wildavsky, A. (1979). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown and Company.

Wibowo, A., & Suryani, E. (2024). *Implementasi Efisiensi Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sektor Pendidikan (Studi Kasus Kabupaten Banyumas)*. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 77–92.

World Bank. (2017). *Infrastructure for Development*. Washington D.C.: The World Bank Group.